

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA PEKON  
DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN *SIRRI*  
(Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**DEDI PIRNANDO  
NPM.1421010327**

**Jurusan : AL-Ahwal Al-Syakhshiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA PEKON  
DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN *SIRRI*  
(Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**DEDI PIRNANDO  
NPM.1421010327**

**Jurusan : AL-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Pembimbing I : Dr..Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.  
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta,S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA PEKON DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN *SIRRI* (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**

**OLEH  
DEDI PIRNANDO**

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari perkawinan, sehingga banyak orang yang begitu enaknya melakukan perpisahan karena permasalahan akibat kurang komunikasi dalam Perkawinan. Padahal sudah tertulis jelas dalam UU Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pekon Pahmungan merupakan salah satu desa yang berada di Kab. Pesisir Barat, di mana berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih banyak terdapat masyarakat Pahmungan yang melakukan Perkawinan *Sirri*. Masyarakat merasakan adanya Perkawinan *Sirri* sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap Perkawinan *Sirri* adalah suatu kewajiban, karena menurut mereka Perkawinan *Sirri* lebih baik daripada berbuat zina.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab masyarakat di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat melakukan Perkawinan *Sirri*? Bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Desa Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam meminimalisir Perkawinan *Sirri*? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat melakukan Perkawinan *Sirri*, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepala Desa Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam meminimalisir Perkawinan *Sirri* serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa dan menginterpretasikan mengenai Perkawinan *Sirri*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik editing dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meminimalisir terjadinya Perkawinan *Sirri*, kepala desa melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut: 1. Tahap awal dengan menghadirkan ustad atau orang yang dipercayai ketika ada pasangan yang hendak melakukan Perkawinan *Sirri* . 2. Melakukan sosialisasi kepada orang yang hendak melakukan Perkawinan *Sirri*, menjelaskan risiko-risiko yang akan dihadapi kedepannya nanti serta akan ada dampak negatif bagi anak yang lahir akibat Perkawinan *Sirri* tersebut 3. Ditangguhkan Surat Kawin jika memang sudah terlanjur melakukan Perkawinan *Sirri*. 4. Memperketat aturan perkawinan *Sirri*. 5. Peningkatan pemahaman agama.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA  
PEKON DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN  
SIRRI (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir  
Tengah Kab. Pesisir Barat)**

**Nama : Dedi Pirnando**

**Npm : 1421010327**

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.**

**NIP. 196201111994031001**

**Pembimbing II**

**Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I**

**NIP. 198802182018011002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan AL-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**NIP. 19750129 200003 1 001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KEPALA PEKON DALAM MENGATASI MARAKNYA KAWIN SIRRI** (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat) Disusun Oleh: **Dedi Pirnando, NPM. 1421010327**, Jurusan: **AI-Ahwal Al-Syakhshiyah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada/Tanggal: **27 Desember 2019**.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I** (.....)

**Penguji Utama : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.** (.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Khairuddin, M.H**

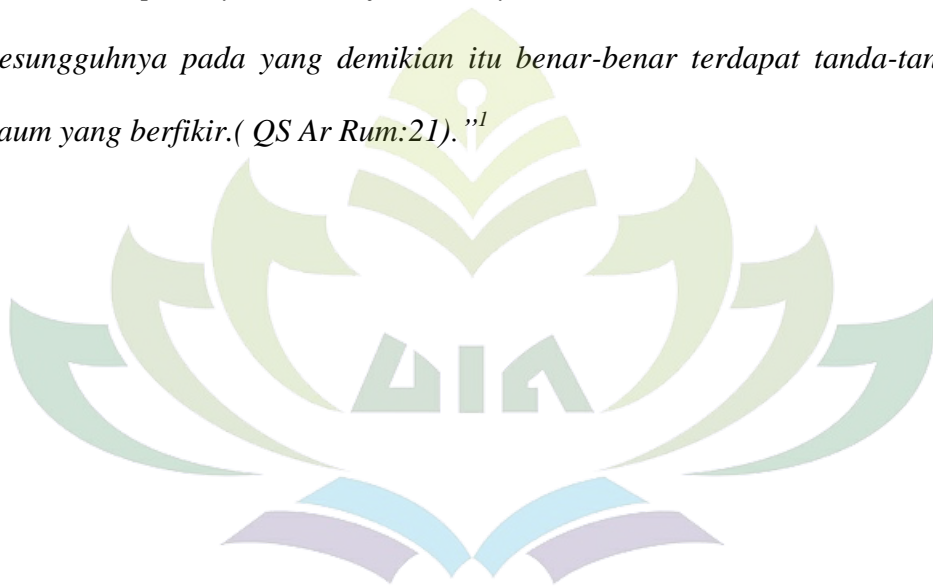
**NIP.196210221993031001**



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( QS Ar Rum:21). ”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet. Ke-22, 1982 M-1402 H)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Darmawan dan Ibunda Ermasiyah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Untuk istriku Nopianti dan buah hatiku Zhawata Afnan yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti.
3. Kakakku tersayang Gus Pia Dewi, Syafril Gunawan, serta adikku Deni Ariska, Oci Aulani, Jeri Aspar yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Dedi Pirnando lahir di Krui pada tanggal 08 Desember 1993 Anak ke tiga dari enam bersaudara, Putra dari pasangan bapak Darmawan dan Ibu Ermasiyah.

Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Pesisir Tengah lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah yang selesai pada tahun 2008 Lalu melanjutkan di Sekolah SMA Negeri 1 Pesisir Tengah tahun 2011.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, penulis mengikuti dan aktif dalam organisasi eksternal Kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah.

Bandar Lampung, 10 Desember 2019  
Penulis

**Dedi Pirnando**  
NPM. 1421010327



## KATA PENGANTAR

Puji sukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.H Khairuddi.,M.H selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Abdul Qodir Zaelani.,S.Ag., M.Ag Selaku Kajur dan Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan Bapak Hervin Yoki Pradikta.,S.H.I.,M.H.I selaku dosen pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus.

5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 atas kebersamaan dan motivasinya secara bersama yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah ).

Bandar Lampung, 10 Desember 2019  
Penulis

**Dedi Pirnando**  
NPM. 1421010327



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SAMPUL DEPAN .....</b>                               | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                                 | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                 | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>xi</b>   |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                       |             |
| A. Penegasan Judul.....                                 | 1           |
| B. Alasan Memilih Judul .....                           | 2           |
| C. Latar Belakang Masalah .....                         | 3           |
| D. Rumusan Masalah .....                                | 9           |
| E. Tujuan Penelitian.....                               | 9           |
| F. Metode Penelitian .....                              | 10          |
| <br><b>BAB II      PEMBAHASAN</b>                       |             |
| A. Perkawinan.....                                      | 17          |
| 1. Pengertian Perkawinan .....                          | 17          |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....                         | 19          |
| 3. Hukum Perkawinan.....                                | 20          |
| 4. Tujuan Perkawinan .....                              | 23          |
| 5. Rukun dan Syarat Syahnya Perkawinan .....            | 24          |
| B. Perkawinan <i>Sirri</i> .....                        | 35          |
| 1. Pengertian Perkawinan <i>Sirri</i> .....             | 35          |
| 2. Perkawinan <i>Sirri</i> dalam Tinjauan Yuridis ..... | 36          |
| 3. Macam-macam Perkawinan <i>Sirri</i> .....            | 40          |
| 4. Faktor Penyebab Perkawinan <i>Sirri</i> .....        | 42          |
| 5. Hukum Melakukan Perkawinan <i>Sirri</i> .....        | 44          |
| C. Pemerintah Pekon.....                                | 46          |
| 1. Pengertian Kepala Pekon .....                        | 46          |
| 2. Tugas Kepala Pekon .....                             | 46          |
| 3. Wewenang Kepala Pekon .....                          | 47          |
| 4. Hak Kepala Pekon .....                               | 48          |
| 5. Kewajiban Kepala Pekon .....                         | 48          |

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN</b>   |    |
| A.             | Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 50 |
| B.             | Pelaksanaan Perkawinan <i>Sirri</i> di Pekon Pahmungan<br>Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat .....                        | 61 |
| C.             | Dampak Praktik Perkawinan <i>Sirri</i> Pekon Pahmungan<br>Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat .....                        | 65 |
| D.             | Upaya Kepala Desa untuk meminimalisir terjadinya<br>Perkawinan <i>Sirri</i> .....   | 69 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS DATA</b>  |    |
| A.             | Faktor-faktor penyebab Perkawinan <i>Sirri</i> Pada Masyarakat<br>Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat..... | 74 |
| B.             | Peran kepala Pekon dalam meminimalisir terjadinya<br>Perkawinan <i>Sirri</i> .....  | 86 |
| C.             | Pandangan hukum Islam terhadap praktek Perkawinan <i>Sirri</i><br>di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.  | 91 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>  |    |
| A.             | Kesimpulan.....   | 97 |
| B.             | Saran .....   | 99 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





**EMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703531,780421*

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Dedi Pirnando  
NPM : 1421010327  
PEMBIMBING I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.  
PEMBIMBING II : Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I  
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN  
KEPALA PEKON DALAM MENGATASI  
MARAKNYA KAWIN SIRRI (Studi Kasus Di Pekon  
Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat)**

| No | TANGGAL<br>KONSULTASI | MATERI<br>KONSULTASI | PARAF   |          |
|----|-----------------------|----------------------|---------|----------|
|    |                       |                      | Pemb. I | Pemb. II |
| 1  |                       |                      |         |          |
| 2  |                       |                      |         |          |
| 3  |                       |                      |         |          |
| 4  |                       |                      |         |          |
| 5  |                       |                      |         |          |
| 6  |                       |                      |         |          |
| 7  |                       |                      |         |          |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

**Pembimbing 1**

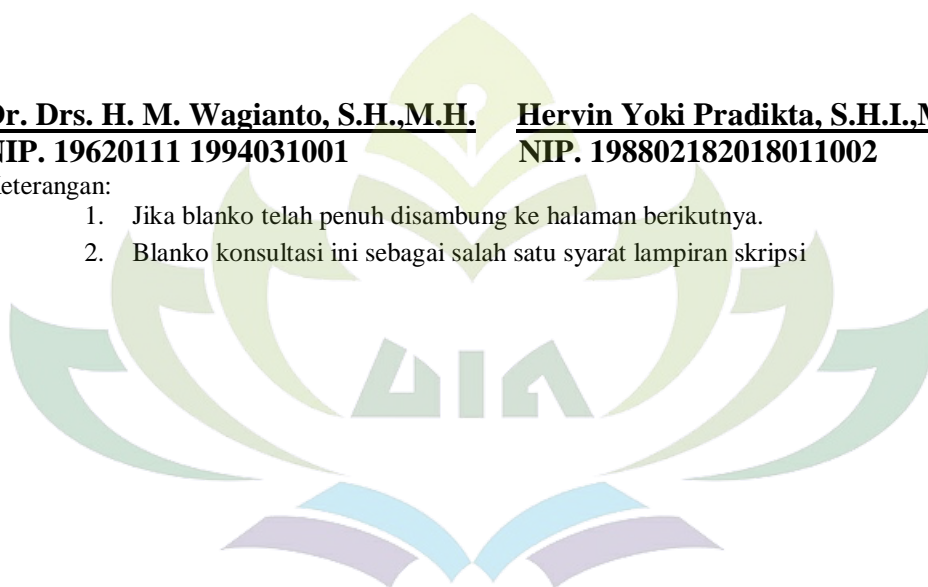
**Pembimbing II**

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19620111 1994031001**

**Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I**  
**NIP. 198802182018011002**

Keterangan:

1. Jika blanko telah penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang di gunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kepala Pekon Dalam Mengatasi Maraknya Kawin Sirri (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat).”.

Untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Tinjauan** yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. Dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

<sup>2</sup> Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.5.

3. **Kepala Pekon** adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>3</sup>
4. **Kawin Sirri** sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama Perkawinan tanpa wali. Perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia (*Sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah Perkawinan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua Perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara..<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Peran Kepala Pekon Dalam Mengatasi Maraknya Perkawinan *Sirri* ditinjau dari hukum Islam.

## B. Alasan Memilih Judul

1. Karena fakta dilapangan Faktor utama terjadinya Perkawinan *Sirri* adalah atas permintaan orang tua agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak Perkawinan *Sirri*, karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi. Sehingga perlu adanya bimbingan dan pengetahuan yang jelas tentang Perkawinan

---

<sup>3</sup> *Hukum Online. Com/Klinik*. Di akses tanggal 13 Juli 2019

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Pt .Rineka Cipta, Jakarta, 1996) h. .3

*Sirri* dan Kepala Pekon harus berperan aktif dalam mengatasi Perkawinan *Sirri* yang akan berdampak negatif bagi masyarakat.

2. Di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa Syari'ah Prodi Al-Ahwal Al-I Syakhshiyah.

### C. Latar Belakang

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, ada beberapa orang yang masih belum mengerti apa tujuan dari perkawinan, sehingga banyak orang yang begitu enaknya cerai talak karena permasalahan akibat kurang komunikasi dalam Perkawinan. Padahal sudah tertulis jelas dalam UU Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>6</sup>

Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan

---

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 4.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 46.



Perkawinan *Sirri* ini sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat dimedia cetak, maupun media elektronik yang tidak diinginkan sebagian besar masyarakat muslim.

Perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin dibawah tangan atau disebut Perkawinan *Sirri* yang saat ini banyak terjadi.

Komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, Perkawinan *Sirri* merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena Perkawinan *Sirri*, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku Perkawinan *Sirri*, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public figure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia.

Perkawinan *Sirri* bisa dikatakan sebagai bentuk Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan

secara resmi pada kantor pegawai pencatat Perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang nonIslam.<sup>7</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2 ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Kasus Perkawinan *Sirri*, apabila dalam Perkawinan *Sirri* itu menghasilkan keturunan (anak), bagaimana dampak yang dirasakan anak dan istrinya. Pertama, dilihat dari norma hukum anak hasil Perkawinan *Sirri* itu bisa di bilang seperti anak hasil hubungan di luar Perkawinan karena tidak dicatat di Negara. Sebagai buktinya dalam akte kelahiran nama ayahnya tidak tercantum, hanya tercantum nama ibunya. Kedua, jika dilihat dari segi Agama Perkawinan *Sirri* itu Perkawinan itu bisa disebut sah, namun kadang hal ini di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak wanita sehingga pihak suami dari Perkawinan *Sirri* ini sering kali lepas tangan dari tanggung jawab menjadi suami karena memang Perkawinanya tidak sah di mata hukum.

Perkawinan tidak cukup hanya berupa telah terjadinya akad secara lisan antara kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), tetapi yang jauh lebih penting adalah mencatatkan akad Perkawinan agar dapat diperoleh alat bukti tertulis yang sah. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari

---

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), h. 22

mudharat di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (yang berupa akta Perkawinan) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling ampuh dalam pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan *Sirri* adalah Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai hukum positif di Indonesia. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Perkawinan *Sirri* yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir batin atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi kedua-duanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu di kaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan. Zina merupakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 60.



perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Hal ini sebagaimana di gariskan dalam Al-Quran surat Al-isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS.Al-Israa:32).<sup>10</sup>

Oleh sebab itu ajaran agama Islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya.

Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan *Sirri*.<sup>11</sup>

Masyarakat khususnya Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, mayoritas masyarakatnya masih banyak yang menganut sistem keluarga. Karena berdasarkan pengamatan penyusun, fenomena selama ini yang ada di dalam lapangan adalah bahwa setiap kali terjadi perkawinan khususnya Pekon Pahmungan masih saja berkumpul dan hidup bersama orang tua atau mertuanya, yang mana sebagian kebutuhan dalam rumah tangganya masih ditopang oleh orang tua mereka dalam batas waktu yang tidak ditentukan.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra h Semarang, 2011), h.258

<sup>11</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksar, 1996), h. 11

Pekon Pahmungan merupakan salah satu desa yang berada di Kab. Pesisir Barat, di mana berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih banyak terdapat masyarakat Pahmungan yang melakukan Perkawinan *Sirri*. Masyarakat merasakan adanya Perkawinan *Sirri* sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap Perkawinan *Sirri* adalah suatu kewajiban, karena menurut mereka Perkawinan *Sirri* lebih baik daripada berbuat zina.<sup>12</sup>

Faktor utama terjadinya Perkawinan *Sirri* adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak Perkawinan *Sirri*, karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi.<sup>13</sup>

Ironinya, pihak yang mengawinkan adalah orang yang dianggap tokoh, Kyai, atau mereka yang dianggap sesepuh. Apalagi di pahmungan sosok seorang Kyai dipandang sebagai sosok yang serba tahu segalanya, yang mengakibatkan masyarakat menganggap Kyai sebagai orang suci di mana setiap perkataannya harus dipatuhi demi mendapatkan barokah.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul” **Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kepala Pekon Dalam Mengatasi Maraknya Kawin *Sirri* (Studi Kasus Di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat)**”.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h. 7

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), h. 25

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab masyarakat di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat melakukan Perkawinan *Sirri*?
2. Bagaimana peran kepala Pekon dalam meminimalisir Perkawinan *Sirri*?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran kepala pekon dalam mengatasi Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat di ambil tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan Apakah faktor penyebab masyarakat di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat melakukan Perkawinan *Sirri*
  - b. Untuk menjelaskan Bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Pekon Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam meminimalisir Perkawinan *Sirri*, sehingga menjadi solusi di masa yang akan datang terhadap pelaksanaan Perkawinan *Sirri* di desa tersebut secara khusus dan wilayah lain pada umumnya.

---

<sup>14</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.



- c. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat agar tidak terjadi kembali Perkawinan *Sirri* yang dapat merugikan masyarakat setempat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Perkawinan *Sirri* yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik Perkawinan *Sirri*.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dan metode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hlm. 48-49.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data dari lapangan. Penelitian dilakukan di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan Perkawinan *Sirri* yang terjadi di masyarakat yang dapat membawa gejolak atau dampak yang buruk. Faktor utama terjadinya Perkawinan *Sirri* adalah atas permintaan orang tua karena agar terhindar dari perbuatan zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak Perkawinan *Sirri*, karena mereka miskin akan akses informasi, pendidikan, dan ekonomi. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari Peran Kepala Pekon

Dalam Mengatasi Sengketa Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 4 remaja dan 8 kepala keluarga.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 95.



penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah populasinya besar atau lebih dari 100, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih, karena dalam penelitian ini populasi yang ada yaitu dibawah 100, maka sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yaitu berjumlah 12 orang. Ada beberapa tehnik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penyusun menggunakan tehnik *purposive sample* (sampel bertujuan), maksudnya yaitu dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Penelitian ini termasuk jenis penelitian populasi, maka sampel terdiri dari 4 remaja dan 8 kepala keluarga.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan Perkawinan *Sirri*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24-50.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Kepala Pekon dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada Kepala Pekon terkait bagaimana praktik pelaksanaan Perkawinan *Sirri* tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

## 6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>19</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>20</sup> Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpretasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena jenis data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa pembahasan dan kemudian hasil analisis menjawab permasalahan penelitian.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 51-78.

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode berfikir induktif akan didapatkan suatu penjelasan khusus mengenai pelaksanaan Peran Kepala Pekon Dalam Mengatasi Kawin *Sirri*, dari faktor tersebut diambil kesimpulan secara umum tentang bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Data kepustakaan kemudian menjelaskan berbagai permasalahan tentang kawin *Sirri* dalam syaria, kemudian peneliti menyusun laporan untuk menunjukkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, sehingga dalam pembuatan laporan akan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau Perkawinan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *Kawin* dan *zawaj*. Menurut fiqih, Kawin adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah: Kawin adalah akad yang menggunakan *lafaz* Kawin yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>22</sup>
- b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santunmenyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>23</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaranIslam mempunyai nilai

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h. 3

<sup>23</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksar, 1996), h. 2

ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>24</sup>

Adapun menurut syara`, Kawin adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>25</sup>

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari Perkawinan adalah boleh atau mubah.

Melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintah oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

<sup>25</sup> Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Kawin Lengka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 8

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. QS An-nisa:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-nisa:3)

### b. QS Al-A'raaf:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنُكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur". (QS Al-A'raaf:189)

### c. QS Ar Rum:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.( QS Ar Rum:21)*

### 3. Hukum Perkawinan

#### a. Hukum Perkawinan Indonesia

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yakni;<sup>27</sup>

- 1) Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah di resipir hukum adat;
- 2) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huweliksordonnantie christen Indonesia*;
- 4) Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- 5) Bagi orang timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum perdata.

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT Rineka Cipta, Jakarta 2005,), h. 7



Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah indonesia merdeka adalah;<sup>28</sup>

Undang- undang No.32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Kawin/kawin, talak dan rujukdi seluruh daerah luar jawa dan madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan Kawin, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan seccara keseluruhan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No. 7Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sebagian dari materi undang-undang inimemuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama.

---

<sup>28</sup> Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat 2007

Di antara beberapa Hukum perundang- undangan tersebut di atas fokus bahasan di arahkan kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu kompilasi hukum Islam yang menyebarluaskan melalui instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi hukum Islam.

## 2) Ketentuan Hukum dan Undang-Undang tentang Perkawinan *Siri/Dibawah*

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahny suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

- a) Bahwa sahny suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat Kawin yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan Kawin oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya Kawin, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

- b) Bahwa sahnya suatu akad Kawin harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan Kawinnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syaria Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “Kawin di bawah tangan”.

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut hukum Islam dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk atau mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram, dan kekal dengan dasar kasih sayang dan cinta.
- c. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Sementara dalam UUP tujuan dari Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>29</sup>

##### 5. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dalam Perkawinan ada lima diantaranya yaitu:

###### a. *Sighat* (akad)

Akad Kawin tidak dianggap sah kecuali dengan *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena akad Kawin berdiri tegak atas kerelaan dua pihak. Sedangkan kerelaan itu bersifat privasi yang berada di dalam sanubari manusia. Yang tidak mungkin bisa ditampilkan, maka *syara*” membuat *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai indikator *zahir* atas kerelaan jiwa masing-masing *aqid*.

*Ijab* ialah ucapan wali pengantin wanita, ( Aku kawinkan putriku denganmu) atau (aku Kawinkan putriku denganmu). *Qulbu* ialah ucapan pengantin laki-laki (aku mengawininya) atau (aku Kawininya).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h 213

<sup>30</sup> Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, h. 112



Sighat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1) *Lafaz at-Tazwij* atau *al-Kawin*

Diisyaratkan di dalam *sighat* adanya *at-Tazwij* atau *al-Kawin* atau kata bentuknya dari dua kata tersebut *Lafaz- Lafaz sighat* merupakan yang digunakan dalam *al-Qura'n* dan *al-Sunah*.

Akad Kawin dianggap sah dengan menggunakan bahasa *ajam*. Yang terpenting di dalamnya terkandung makna Kawin. Akan tetapi lebih baik menggunakan bahasa arab. Dan juga karena *Lafaz at-Tazwij* atau *al-Kawin* di dalam *al-Quran* tidak dihubungkan dengan *ijaz*, maka tidak mengapa akad Kawin menggunakan bahasa terjemah.

Tidak dianggap sah berakad dengan bahasa *kinayah* (kata sindiran). Dan juga tidak sah berakad Kawin dengan menggunakan bahasa tulisan, karena itu termasuk dalam *kinayah* baik dari pengantin pria atau wali pengantin wanita.

2) *Lafaz at-Tazwij* atau *al-Kawin* harus jelas

Diisyaratkan harus jelas dan terang melafazkan kata *at-Tazwij* atau *al- Kawin* pada masing-masing *ijab* dan *qabul*. Akad Kawin dianggap sah jika *Lafaz at-Tazwij* atau *al-Kawin* didatangkan dalam bentuk perintah. *Qabul* harus disegerakan setelah *ijab*, yaitu dengan memastikan *muwalah* (secara langsung

dan tidak terpisah).<sup>31</sup>

3) Tetapnya keahlian dua *akid* sampai *qabul*

Kedua *akid* (wali pengantin wanita dan pengantin laki-laki) tetap atas keahliannya (kelayakan dalam berakad) sampai *qabul* selesai diucapkan. Andaikata keahlian *akid* itu berubah sebab gila atau pingsan sebelum terjadi *qabul*, batalah *ijab* tersebut.

b. *Pengantin wanita*

Pengantin wanita ialah tempat akad sekaligus wanita yang diKawini. Ungkapannya didalam Kawin tidak dianggap sah, karena telah ditempati oleh otoritas wali.

Syarat agar pengantin wanita dianggap sah dalam Perkawinan adalah yang tertera berikut ini:

- 1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang memmbuat dia dilarang Kawin.

Untuk mencapai keabsahan akad Kawin, maka pengantin wanita diharuskan terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat ia dilarang Kawin, baik karena hubungan keluarga, persemendaan atau persusuan (baik yang bersifat permanen atau sementara)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h 114-116

2) Menentukan wanita hendak diKawini dalam redaksi akad.

Diisyaratkan bagi pengantin wanita harus pasti dan tentu orangnya di dalam akad. Jika tidak demikian akad Kawin dianggap batal. Oleh sebab itulah wajib hukumnya memastikan pengantin wanita di dalam akad, karena yang dimaksudkan dalam Perkawinan adalah dua orang yang melakukan akad Kawin.

3) Tidak dalam keadaan ihram.<sup>32</sup>

c. Pengantin laki-laki

Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Pada umumnya pengantin laki-laki itu ialah *qabil* (penerima), atau siapa saja yang menggantikan posisinya. Pengantin laki-laki disyaratkan memenuhi empat hal, yaitu:

1. Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang Kawin.
2. Menentukan laki-laki yang hendak diKawini dalam redaksi akad.
3. Tidak dalam keadaan ihram.
4. Kelayakan.<sup>33</sup>

Para *ulama* menetapkan usia bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan yaitu melalui undang-undang *al-ahwal ash-shakhsyiah*. Dalam undang-undang tersebut telah ditentukan, bahwa laki-laki boleh melaksanakan akad Kawin jika usianya genap 18 tahun, dan 17 tahun bagi wanita. Kecuali dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h 121

<sup>33</sup> *Ibid.*, h 123

keadaan-keadaan tertentu.<sup>34</sup>

d. Wali

Wali pengantin wanita adalah rukun di dalam Perkawinan, karena seorang wanita tidak boleh Kawinkan seorang diri, sebab ia tidak mempunyai otoritas untuk itu, baik secara langsung, dengan izin atau dengan melalui pengganti orang lain. Dia juga tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan *ijab qabul* sendiri, sebab menurut kebiasaan yang telah berlaku wanita itu memiliki kekurangan dalam mengurus Perkawinannya sendiri, sebab sifat pemalu yang mendominasi dirinya. Karena itu Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita....”(an-Nisa”: 34)”<sup>35</sup>

Tujuan adanya persyaratan wali dalam Perkawinan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguruskan urusan Perkawinan sesama wanita, sebagaimana orang yang tertuduh boros dalam membelanjakan harta, maka Kawin tersebut batal, dan Perkawinannya tidak sah.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h 124

<sup>35</sup> Al-Quran, 4:34.



Istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* karena rusaknya akad Kawin, dan tidak ada *diyat* keperawanan atasnya. Juga tidak wajib menghukum laki-laki yang Kawininya, karena ketidakjelasan perbedaan dikalangan *ulama*” mengenai keabsahan Kawinnya. Sedangkan hukum pidana itu tidak bisa diterima oleh sesuatu yang tidak jelas, hanya saja berkeyakinan bahwa hubungan seks yang ia lakukan itu haram hukumnya.

Wali itu sendiri memiliki urutan dalam Perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung<sup>36</sup>
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki ayah yang sekandung
- 8) Saudara laki-laki ayah yang seayah
- 9) Anak saudara laki-laki ayah sekandung
- 10) Anak saudara laki-laki ayah sekandung
- 11) Ashabah

---

<sup>36</sup> *Op.Cit.*, h 125-128.

*Asabah* tidak ada, maka mereka boleh diKawinkan oleh wali hakim, sebagaimana hadits yang telah lalu “Penguasa boleh menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Demikian juga jika salah satu wali menghalangi mereka Kawin, maka hakim boleh Kawinkannya. Dan tidak perlu berpindah kepada urutan wali yang lebih jauh.

Ada perwalian bagi anak laki-laki hingga ke bawah dalam Perkawinan, karena perwalian itu telah ditetapkan dalam Perkawinan untuk wali yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan nasab. Tidak ada nasab antara anak laki-laki dengan ibu. Jadi, seorang laki-laki tidak boleh Kawinkan ibunya hingga keatas, karena nasab anak laki-laki itu disandarkan pada ayahnya. Kecuali jika anak laki-laki dari saudara laki-laki (paman), atau anak laki-laki tersebut berstatus sebagai hakim atau wakil dari ibu tersebut, maka boleh Kawinkannya namun bukan dengan sifat sebagai anak.

Adapun syarat-syarat menjadi wali yang akan menentukan keabsahan Perkawinan, diantaranya yaitu:<sup>37</sup>

#### 1) Seagama

Syarat di dalam perwalian adalah hendaknya orang yang mengawinkan wanita muslimah adalah laki-laki muslim, karena tidak ada perwalian bagi orang kafir atas laki-laki

---

<sup>37</sup> *Op.Cit.*, h 129.

muslim atau wanita muslimah.

2) *Adl* (lurus)

Menurut *qaul* al azhar, seorang wali diisyaratkan harus adil. Yang dimaksud ialah orang yang tidak berlumuran dosa besar atau selalu berbuat dosa-dosa kecil. Dan tidak mengerjakan sesuatu yang bisa melepaskan kehormatannya, misalnya kencing di jalan atau berbuat sewenang-wenang. Jika dia tidak bisa mencegah perbuatan-perbuatan buruk ini maka dia termasuk orang yang fasik. Dan orang yang fasik itu tidak punya hak untuk menikahkan wanita mukminah meskipun anak perempuannya sendiri. Dan hak perwalian berpindah kepada urutan wali berikutnya yang *adl*.

3) *Taklif*<sup>38</sup>

Diisyaratkan wali Kawin hendaknya *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal jadi tidak ada perwalian bagi anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki otoritas akad dan perwalian untuk dirinya sendiri terlebih untuk orang lain. Dan urutan wali berikutnya menduduki tempatnya dalam akad Kawin.

4) Terbebas dari penyakit yang melepaskan pandangan

Diisyaratkan seorang wali Kawin hendaknya terbebas dari penyakit yang menghilangkan ingatan, misalnya: pikun.

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, 129-131.

Jika cacat dikarenakan usia yang sangat tua, rusaknya organ tubuh, penyakit yang sangat parah atau penyakit yang bisa menghilangkan ingatan dan pengetahuan mengenai kemaslahatan. Maka tidak ada perwalian baginya kuasa perwaliannya tercabut. Demikian orang yang sudah tua tidak ada perwalian baginya. Maka perwaliannya digantikan oleh urutan wali berikutnya.

Sedangkan orang buta boleh Kawinkan dan Kawini. Demikian orang bisu, jika memang dia memiliki pengetahuan mengenai tulisan dan isyarat yang bisa dipahami. Dan juga orang yang pingsan atau kemasukan setan, maka perwaliannya tetap berlaku, tetapi harus menunggu sampai dia sembuh seperti sedia kala.

5) *Hajr*<sup>39</sup>

Diisyaratkan seorang wali Kawin hendaknya terbebas dari tuduhan idiot, sebab ia tidak boleh menggunakan harta bendanya. Maka tidak ada otoritas perwalian pada dirinya, terlebih untuk orang lain. Sehingga status perwalian berpindah pada urutan wali berikutnya.

#### 6) Dalam keadaan boleh Kawinkan

Diisyaratkan seorang wali Kawin hendaknya dalam keadaan boleh Kawinkan, yaitu tidak dalam keadaan berihram, baik sebab haji atau umrah. Karena orang yang sedang

---

<sup>39</sup> *Op.Cit.*, 132.

ihram tidak bisa Kawinkan dirinya sendiri, terlebih orang lain.

e. Dua saksi

Akad Kawin harus dihadiri dua saksi, demi menghindari dan melindungi Perkawinan dari perbuatan *juhud* (penyelewengan). Karena di dalamnya terdapat konsekuensi logis dan nilai positif. Misalnya, diperbolehkannya interaksi antara suami dan istri, memberikan maskawin dan nafkah, penetapan nasab anak, hak waris dan lain-lain. Sehingga kehadiran dua saksi sebagai tujuan atau kesepakatan yang bersifat *daruri* dalam menetapkan nilai-nilai tersebut untuk melakukan pengakuan ketika terjadi permasalahan. Sunah hukumnya menghadirkan orang saleh dan orang-orang yang mumpuni dalam agama.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Dua laki-laki.
- 2) Beragama Islam. *Baligh* (dewasa) dan berakal sehat.
- 3) Termasuk orang yang „*adl*
- 4) Bisa mendengar
- 5) Laki-laki yang normal penglihatannya
- 6) *Dhabit* (kuat ingatannya)
- 7) Bukan ditetapkan oleh *syara'* sebagai wali.<sup>41</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang sah ialah menimbulkan akibat hukum

---

<sup>40</sup> *Op. Cit.*, 132-144.

<sup>41</sup> *Op. Cit.*, 145-146.



berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dan juga pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa orang pribadi atau badan hukum. Badan hukum itu selanjutnya dapat pula berupa badan hukum publik maupun perdata.<sup>42</sup>

Para sarjana dan ahli hukum serta golongan yang selama ini tunduk dan melaksanakan Perkawinan berdasarkan KUH perdata atau badan ordonasi Perkawinan kristen Indonesia, yang hanya dengan adanya akta Perkawinanlah dapat dibuktikan sahnyanya Perkawinan itu. pasal 100 BW berpendapat bahwa saat mulai sahnyanya Perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan Perkawinan tersebut.

Sedangkan pendapat lainnya yang umumnya dianut oleh umat Islam, bahwa saat mulai sahnyanya Perkawinan itu bukanlah pada saat pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran dan pencatatan itu hanyalah tindakan administrasi belaka. Akan tetapi sahnyanya Kawin itu mulai pada saat selesainya tata cara keagamaannya, misalnya saat selesainya akad Kawin diucapkan kedua belah pihak atau antara wali Kawin dari wanita dan mempelai laki-laki.

Dasar dan alasan pendapat-pendapat tentang saat sahnyanya Perkawinan, antara lain pencerminan dari kurang konsistensinya bunyi undang-undang dan PP No. 9 tahun 1975. Pendapat pertama selain didukung dari praktik hukum dari badan-badan publik juga

---

<sup>42</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya* (Bandung: Offset Alumni, 1981), h. 18.

pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP. No. 9 tahun 1975) dan juga dari hakekat dan jiwa undang-undang.<sup>43</sup>

Undang-undang perkawinan yang terpenting dapat dikemukakan disini ialah pasal 2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Perkawinan Sirri**

### **1. Pengertian Perkawinan Sirri<sup>44</sup>**

Kawin siri adalah Perkawinan yang dilaksanakan dimuka pejabat yang tidak berwenang tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Terhadap tidak dicatatnya Perkawinan pada pejabat yang berwenang ada kemungkinan penyebabnya, yaitu mereka Kawin dihadapan tokoh masyarakat, kyai, atau pada orang tertentu yang memang tidak mempunyai otoritas untuk mengeluarkan surat-surat yang berhubungan dengan Perkawinan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam* ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 23

Munculnya kasus Kawin siri dalam konteks tidak adanya catatan KUA disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-beda, seperti karena adanya berbagai hambatan dan juga dari faktor ketidaksiapan baik dari segi psikologi, sosiologi maupun ekonomi.<sup>46</sup> Sedangkan Kawin siri itu sendiri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata yaitu *Kawin* dan *sirri*.

Kata Kawin dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nominal) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab *nakaha*, *yunkihu*, *Kawinan*. Atau Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Dan kata siri adalah salah satu bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *siriyyan*. Secara terminologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan kata *sirriyan* berarti secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, atau secara misterius. Kata *sirri*, *sirran*, atau *sirriyyan* dalam bahasa Indonesia bukanlah kata baku dan pemakaiannya belum populer di Indonesia. Namun demikian, kata Kawin siri sebagai masyarakat terutama sebagian umat Islam di Indonesia cukup banyak dikenal.

## 2. Perkawinan *Sirri* dalam Tinjauan Yuridis

Rancangan Undang-Undang Kawin *Sirri* atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan Perkawinan tanpa dokumen

---

<sup>46</sup> Dedi Nurhaedi, *Kawin di Bawah Tangan Praktik Kawin Siri Mahasiswa Jogja* (Jogja: Ar-Ruzz Media, 2003) h. 18.

resmi atau yang biasa disebut sebagai Kawin *Sirri*, kini tengah memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

- a. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat Kawin dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 16 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta.<sup>47</sup>
- b. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah di hukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta. Adapun fakta Perkawinan *Sirri* kedua, yakni Perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni hukum Perkawinannya dan hukum tidak mencatatkan Perkawinan di lembaga pencatatan Negara.

---

<sup>47</sup> Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Kawin Sirri h. I.* <http://irmadevita.com> (15 Februari Muh. ramli. makalah tentang Perkawinan Sirri <http://kuden-uden.blogspot.com/2013/02/i.html>, di akses tanggal 15 Agustus 2019

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia.

Jadi menurut ketentuan dengan negara Kawin *Sirri* tidak sah dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi. Namun dari aspek Perkawinannya, Kawin *Sirri* adalah sah menurut ketentuan syariat jika dipenuhi adanya wali dan saksi dan pelakunya tidak sehingga tidak berhak dijatuhi sanksi. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori "mengerjakan yang haram" dan "meninggalkan yang wajib". Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>48</sup>

Berbeda dengan Kawin *Sirri* yang dilakukan tanpa wali atau saksi, golongan Syafi'iyah berpendapat hal tersebut tidak sah. Pasalnya, Perkawinan yang ia lakukan tidak memenuhi rukun-rukun Perkawinan yang digariskan oleh Allah Swt.

Adapun rukun-rukun Perkawinan adalah wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Jika tiga hal ini tidak dipenuhi, maka Perkawinan seseorang dianggap tidak sah secara syariat.

---

<sup>48</sup> Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Cet.I; Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 291



Hal-hal positif yang didapat dari penyiaran Perkawinan yaitu antara lain :<sup>49</sup>

- a. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat terhadap pasangan yang melakukan Perkawinan.
- b. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai.
- c. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah Kawin atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan Perkawinan yang tidak disiarkan atau dirahasiakan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang di Kawini *Sirri* hamil maka akan muncul dugaandugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, Perkawinan *Sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai Perkawinannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi (buku Kawin dan kartu keluarga), maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi Perkawinan *Sirrinya*, dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan Perkawinan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 69

### 3. Macam-macam Perkawinan *Sirri*

Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam dari Kawin *Sirri*, yaitu:

#### a. Kawin yang dilakukan tanpa adanya wali

Perkawinan seperti ini jelas bahwa Perkawinan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi'i. Sebab wali merupakan rukun sahnya Perkawinan.<sup>50</sup>

#### b. Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang ada dibawah wewenang KUA atau disebut juga Kawin dibawah tangan.

Perkawinan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan Perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan Perkawinan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika Perkawinan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) dihadapan majlis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan Perkawinan,

---

<sup>50</sup> Effi Setiawan, *Kawin Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, (Cet.I; Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), h. 36-42

maupun sengketa yang lahir akibat Perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya<sup>51</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa Perkawinan itu haruslah dicatat kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah sebagaimana Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya) ...(QS. Al-Baqarah: 282).<sup>52</sup>

c. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi

Sebagian besar ulama mengharuskan adanya saksi dalam Perkawinan, karena saksi merupakan syarat sah dalam Perkawinan. Dengan demikian, akad Perkawinan yang dilaksanakan tanpa saksi hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus hadir ketika akad Kawin, dan tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut para ulama, Perkawinan merupakan hal yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari jual beli adalah harta benda, sedangkan tujuan Perkawinan adalah memperoleh kenikmatan dan keturunan. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan hati-hati dengan cara menghadirkan dua saksi. Berbeda dengan Imam Maliki, yang membolehkan Kawin tanpa adanya saksi.

<sup>51</sup> Susanto, *Kawin Sirri Apa Untungnya*, (Cet.I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 51

<sup>52</sup> Menteri Agama, *Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Makkah: lembaga Percetakan Raja Al-Fahd, 1971), h. 43

- d. Perkawinan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di l'ankan kekhlayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah

Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam Perkawinan itu wajib hukumnya. Memberitakan Perkawinan dianggap merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya saksi bukan merupakan syarat sah Kawin, melainkan hanya agar Perkawinan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak lagi diperlukan<sup>53</sup>

#### 4. Faktor Penyebab Perkawinan *Sirri*

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan Perkawinannya di lembaga pencatatan sipil negara, yaitu :

- a. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
- b. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri Kawin lebih dari satu dan lain sebagainya.
- c. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Perkawinan siri.
- d. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan Perkawinannya.<sup>54</sup>
- e. Kawin siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>54</sup> Susanto happy, 2007, *Kawin sirri apa untungnya*, (Transmedia Pustaka,Jakarta selatan), h 40

punya biaya pendaftaran/pencatatan Kawin ke KUA.

- f. Kawin siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan Kawin terlebih dahulu.
- g. Dari pihak orang tua Perkawinan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina.
- h. Kawin siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi Kawin dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- i. Kawin siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila Kawin secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.
- j. Kawin siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawin siri.



## 5. Hukum Melakukan Perkawinan *Sirri*

Dalam kajian fiqh Islam terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum Perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa golongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa Kawin itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa Kawin itu wajib.

Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa Kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum Kawin berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal Kawin adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Untuk mengetahui lebih jelas status masing-masing hukum Kawin sesuai dengan kondisi *al ahkam al khamsah*, berikut ini akan ditelaah secara sekilas:

### a. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan

bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada rasionalitas hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan Perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan Perkawinan itu wajib sesuai dengan kaidah: *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukum wajib juga.*

b. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan bila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

### C. Pemerintah Pekon

1. Pengertian Kepala Pekon

Kepala Pekon adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Pekon merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Pekon adalah 6 tahun dan dapat diperpanjangkan lagi untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala Pekon tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

2. Tugas Kepala Pekon

Sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Pekon bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 3. Wewenang Kepala Pekon

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pekon berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 5) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; serta
- 6) Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 7) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 8) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 10) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 11) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 12) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 13) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Hak Kepala Pekon

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Pekon berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan dan emerintahan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya pada perangkat desa.

#### 5. Kewajiban Kepala Pekon

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pekon berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,



transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1. Kecamatan Pesisir Tengah**

###### **a. Keadaan Umum Wilayah**

Kecamatan pesisir tengah dimekarkan pada kwartal 1 tahun 1949 berdasarkan ketetapan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Selatan, Palembang dengan ibukota Pasar Krui (sampai sekarang). Secara geografis Kecamatan Pesisir Tengah terletak antara  $103^{\circ}$ - $104^{\circ}$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}$ - $6^{\circ}$  Lintang Selatan. Luas wilayah seluruhnya 110,01Km<sup>2</sup> dengan tofografi 25% adalah daratan pantai Samudra Indonesia dan 75% adalah pegunungan pada daerah Bukit Barisan Selatan yang tersebar pada 19 pekon dan 1 kelurahan. Pesisir Tengah krui mempunyai pembagian tanah yaitu terbagi atas tanah sawah seluas 1.472 ha, tanah kering seluas 15,613 ha, tanah basah/rawa seluas 105 ha, kawasan hutan seluas 9.814 ha, tanah perkebunan seluas 1.700ha, tanah fasilitas umum seluas 170 ha, tanah fasilitas sosial seluas 80 ha, dan tanah tandus/pasir seluas 11.096 ha. Kecamatan Pesisir Tengah berjarak 297 Km menuju ibukota propinsi, 34 Km dari pusat pemerintahan kabupaten, dan 11 dari pekon atau kelurahan terjauh.

Pesisir Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan

- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera India
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit dan Batu Brak

b. Keadaan Penduduk/Demografis

Penduduk Kecamatan Pesisir Tengah terdiri dari penduduk asli (Lampung) dan penduduk pendatang dari luar daerah seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Palembang, dan Bengkulu. Jumlah kepala keluarga di wilayah Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 6.386 kk dengan perincian 16291 orang laki-laki dan 15542 orang perempuan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan pesisir Tengah terdiri dari sarana dan prasarana perhubungan, pemerintahan, pemasaran, dan social pendidikan. Kecamatan Pesisir Tengah memiliki prasarana perhubungan berupa jalan aspal, jalan diperkeras dan jalan tanah yang semuanya dapat dilalui sepanjang tahun. Sarana perhubungan berupa alat transportasi yang terdiri dari bus, angkot, ojek, dan becak. Prasarana pemerintah yang ada di kecamatan ini berupa balai pekon sebanyak 17 kantor, kantor kelurahan sebanyak 1 kantor, dan 1 kantor kecamatan. Prasarana pemasaran dikecamatan ini berupa pasar yang terletak di pusat kecamatan. Prasarana sosial kecamatan berupa 38 masjid, 27 mushola, 1 kantor pos, 1 puskesmas, 2 rumah bersalin, 1 poliklinik/balai pengobatan, 1 kantor polisi, 1 kantor Telkom, 1 kantor PLN, 2 bank (bank BRI dan bank Lampung). Sedangkan sarana pendidikan yang dimiliki adalah 7 TK,

25 SDN, 4 Madrasah, 1 SD swasta, 3 SD swasta Islam, 4 SLTPN, 1 SLTP swasta umum, 5 SLTP swasta Islam, 1 SMUN, 1 MAN, 1 SMU swasta umum, 2 SMK dan 3 SMU swasta Islam.

## 2. Pekon Pahmungan

### a. Sejarah Pahmungan<sup>55</sup>

Pekon pahmungan adalah tanah subur yang berbukit yang diapit oleh dua aliran sungai yaitu way ngison balak dan way mahnai lunik kemudian batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah barat pasar Krui sampai balai kencana
- 2) Sebelah timur taman nasional
- 3) Sebelah utara way ngison balak (marga pedada)
- 4) Sebelah selatan way mahnai lunik (kecamatan pesisir selatan)

Berdiri lebih kurang 1800 tahun yang lalu berasal dari liba Haji Sumbangsai, di kepalai oleh ratu agung kumala jagat dan anak tertuanya raden mangku dan cucu raden bungkus yang mendapat sertifikat sebagai sai batin dari bengkulen karena kita masih masa keresidenan bengkulen dan berkembang sampai sekarang menjadi 3 sai batin yaitu:

- 1) Dalam darmas saputra gelar dalam kapitan
- 2) Dalam zoni ifto gelar dalam sangai agung
- 3) Dalam al-badawi dalam simangan

---

<sup>55</sup> Dokumentasi Profil Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

Pada tahun 1868 raja muda merah hidio adalah pertain pertama pekon pahumang. Berdiri setelah itu raden bungkus mendapat sertifikat sai batin dari bengkulen. Pekon pahumang sendiri dibagi menjadi 3 pemangku saat ini yang di pimpin oleh kepala pemangku yaitu:

- 1) Pemangku 1 lumpawai
- 2) Pemangku 2 pekon tuha
- 3) Pemangku 3 way ulok megrecek

b. Sejarah Pemerintah Pekon<sup>56</sup>

Sejarah pemerintah pekon dalam hal ini nama-nama peratin yang pernah memimpin wilayah pahmungan kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat di sajikan dalam table berikut ini:

**Tabel 1. Nama-nama peratin pahmungan**

| No | Periode   | Nama Peratin | Keterangan  |
|----|-----------|--------------|---|
| 1  | 1868-1888 | Raja muda    | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 2  | 1888-1896 | Isa          | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 3  | 1896-1900 | Jamaludin    | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 4  | 1900-1910 | M. Zainul    | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 5  | 1910-1911 | Dahum        | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 6  | 1911-1918 | Mat Rasul    | Krui masih keresidenan bengkulen  |
| 7  | 1918-1948 | H. Muslim    | Penyelesaian tapak batas bagian selatan dengan tenumbang saksi hidup sampai sekarang pertukaran marga kepada mentri/pemerintah lampung. |
| 8  | 1949-1958 | Bahsa        | Kepala negeri/camat khotua  |

<sup>56</sup> Dokumentasi Profil Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

|    |              |            |   |
|----|--------------|------------|---|
| 9  | 1959-3 Bulan | Belhi      | Mengundurkan diri dari peratin  |
| 10 | 1959-1960    | H. Delimin | Saksi hidup sampai sekarang   |
| 11 | 1960-1965    | H. Burdadi | Peratin jadi Kepala Pekon   |
| 12 | 1966-1996    | Rosba Toha | Pahmungan bian barat pisah jadi pekon suka Negara dengan batas masjid sukanegara sekarang dan rawas diminta Kp. Jawa dan sekarang jadi pekon rawas. Tahun 1985 sukanegara minta penambahan wilayah pada pahmungan dengan batas SD negeri pahmungan. |
| 13 | 1996-1998    | H. Delmi   |   |
| 14 | 1999-2005    | Fahmi      | Kembali dari Kepala Pekon menjadi peratin   |
| 15 | 2005-2007    | Herna      | Tapal batas pahmungan sukanegara. Pahmungan tenumbang sampai sekarang belum ada kelanjutan dari pemda.  |
| 16 | 2008-2015    | Andika     | Terbentuknya pesisir barat, sebagai wilayah utara pahmungan menjadi bagian wilayah kecamatan way krui termasuk wilayah pemukiman.   |
| 17 | 2015         | Albadawi   | Pemulihan kembali atar puan dan atar labuai.  |
| 18 | 2016-2022    | Nopan      | Peratin terpilih tahun 2016   |

Sumber: Profil Pekon Pahmungan, 2016.

c. Sejarah pembangunan pekon

Secara umum sejarah pembangunan pekon yang telah terlaksanakan di pahmungan kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat sejak awal pemekaran hingga saat ini terus membangun baik SDM maupun Inspratiksturnya.



d. Kondisi geografis

1) Letak dan luas wilayah

Pekon atau desa pahmungan merupakan salah satu Pekon di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat yang memiliki luas 2.600ha. Pekon Pahmungan terletak pada 5°LS dan 103°BT dan berjarak 4 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 32 Km dari ibukota kabupaten, dan 287 Km ke ibukota propinsi. Jenis tanah di Pekon Pahmungan umumnya Podsolik Merah Kuning (PMK) dengan curah hujan berkisar 3000-3500 mm pertahun. Sebaran penggunaan lahan di Pekon Pahmungan dapat dilihat dalam Tabel 2.<sup>57</sup>

**Tabel 2. Sebaran penggunaan lahan masyarakat di Pekon Pahmungan.**

| No     | Penggunaan Lahan       | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|--------|------------------------|-----------|----------------|
| 1.     | Permukiman Penduduk    | 25        | 0,96           |
| 2.     | Hutan Lindung          | 500       | 19,23          |
| 3.     | Perkebunan             | 900       | 34,62          |
| 4.     | Sawah semi teknis      | 40        | 1,54           |
| 5.     | Perbukitan /pegunungan | 800       | 30,77          |
| 6.     | Lain-lain              | 335       | 12,88          |
| Jumlah |                        | 2600      | 100,00         |

Sumber: Profil Pekon pahmungan, 2016.

<sup>57</sup> Dokumentasi Profil Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan sebagian besar untuk pertanian khususnya perkebunan damar (34,62 %), hutan lindung(19,23%), lain-lain(12,88%), dan berupa pegunungan(30,77%), sedangkan sebagian kecil digunakan untuk sawah(1,54%) dan permukiman(0,96%).

Pekon pahmungan merupakan salah satu pekon dari 8 pekon di wilayah kecamatan pesisir tengah yang terletak 2 (dua) KM ke arah utara dari ibukota kecamatan.

## 2) Iklim

Iklim pekon pahmungan sebagaimana dengan pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di pekon pahmungan kecamatan pesisir tengah.

Jumlah Penduduk 1144 Jiwa, yang tersebar dalam 3 pemangku, gambaran jumlah penduduk yang ada di pahmungan dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 3 sebaran penduduk Pahmungan<sup>58</sup>**

| No | Nama Pemangku           | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|----|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1  | PMK 1 Lumpak Way        | 585                    | 254              | 331              |
| 2  | PMK 2 Pekon Tuha        | 306                    | 105              | 201              |
| 3  | PMK 3 Way Ulok Megrecek | 253                    | 174              | 79               |

Sumber: Profil Pekon pahmungan, 2016.

### 3) Perekonomian Pekon

Dalam menjalankan pembangunan wilayah membutuhkan sumber pendanaan, baik itu berupa pajak, bantuan, swadaya ataupun dari sumber lainnya. Demikian halnya dengan pahmungan, dimana penerimaan berasal dari berbagai sumber. Adapun sumber penerimaan pahmungan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 4 Sumber Pendapatan Pekon**

| No | Sumber Penerimaan Pekon | Tahun |      |      |
|----|-------------------------|-------|------|------|
|    |                         | 2014  | 2015 | 2016 |
| 1  | ADI                     |       | V    | V    |
| 2  | PPD                     |       | V    |      |
| 3  | PNPM                    |       | V    |      |
| 4  | UMBR                    |       | V    |      |
| 5  | APBD PROV               |       | V    | V    |
| 6  | APBD KAB                |       | V    | V    |
| 7  | APBN                    |       | V    | V    |

Sumber: Profil Pekon pahmungan, 2016.

<sup>58</sup> Dokumentasi Profil Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat

#### 4) Keadaan penduduk

Sebagian besar penduduk Pesisir Tengah, Lampung Barat beragama islam dengan jumlah 31.833 jiwa. Pekon Pahlungan memiliki jumlah penduduk sampai 1.176 jiwa, yang terdiri dari 558 orang laki-laki dan 618 orang perempuan dengan 281 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk enurut golongan usia dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Jumlah penduduk Pekon Pahlungan menurut golongan usia.**

| <b>Kelompok umur (tahun)</b> | <b>Jumlah(orang)</b> | <b>Persentase(%)</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0-14                         | 329                  | 27,98                |
| 15-29                        | 264                  | 22,45                |
| 30-44                        | 301                  | 25,6                 |
| >45                          | 282                  | 23,98                |
| Total                        | 1176                 | 100                  |

Sumber: Profil Pekon pahlungan, 2016.

Penduduk Pekon Pahlungan mayoritas merupakan penduduk usia produktif (berumur 15-44 tahun), yaitu sebanyak 565 orang (48,11%), dan 329 orang(27,98%) merupakan penduduk dibawah umur.

### 5) Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana yang ada di Pekon Pahlungan terdiri dari sarana angkutan dan komunikasi, prasarana perhubungan, pemasaran, social. pendidikan dan agama, kemasyarakatan, kesehatan, dan olahraga. Sarana dan prsarana yang ada di Pekon Pahlungan disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Pekon Pahlungan.**

| No. | Prasarana/Sarana       | Jenis   | Jumlah   |
|-----|------------------------|---|--|
| 1.  | Perhubungan            | Jalan aspal<br>Jalan tanah<br>Jembatan                                | 2 Km<br>1Km<br>2 buah                            |
| 2.  | Pemasaran              | Kios /Warung<br>Pasar pekon   | 16 buah<br>3 buah                                |
| 3.  | Sosial dan pendidikan  | Sekolah Dasar   | 1 buah   |
| 4.  | Kemasyarakatan         | Masjid/musolla<br>Balai Pekon   | 3 buah<br>1 buah                                 |
| 5.  | Kesehatan dan olahraga | Pos Kamling<br>Posyandu<br>MCK umum                                   | 3 buah<br>1 buah<br>6 unit                       |
| 6.  | Sarana angkutan        | Angkutan pedesaan<br>Sepeda motor<br>Sepeda<br>Becak<br>Mobil pribadi | 3 buah<br>23 buah<br>20 buah<br>3 buah<br>3 buah |
| 7.  | Sarana Komunikasi      | Pesawat TV<br>Pesawat<br>Telepon<br>Radio<br>Antena parabola          | 25 buah<br>15 buah<br>25 buah<br>23 buah         |

Sumber: Profil Pekon pahlungan, 2016.

### 3. Visi Pekon Pahmungan<sup>59</sup>

*“Menjadikan Pekon Pahmungan sebagai Pekon yang makmur, aman, bersih dan berwawasan lingkungan”*

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Pekon Pahmungan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga ke depan Pekon Pahmungan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

### 4. Misi Pekon Pahmungan

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Pekon Pahmungan yang makmur, aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peduli terhadap lingkungan.

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Profil Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat



## **B. Pelaksanaan Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Setelah penulis melakukan penelitian di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN atau sering disebut dengan kawin *Sirri*, bahkan setiap kelurahan ada tapi penulis meringkas penelitian ini dengan mengambil satu sample pelaksanaan kawin *Sirri* di satu kelurahan yaitu Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Yang berarti terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau kawin *Sirri*. Berdasarkan usia para pelaku perkawinan *Sirri* yang terjadi pada Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat rata-rata anak-anak dibawah umur yang belum layak nya melakukan perkawinan. Adapun menurut pendidikannya, rata – rata kawin *Sirri* dilakukan oleh masyarakat yang tidak lulus sekolah dasar (SD) atau biasa disebut dengan patah pensil. Berdasarkan mata pencaharian para informan, perkawinan *Sirri* dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai pabentor dan buruh harian.

### **1. Profesi Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Seperti di jelaskan di bab I, bahwa hakekat perkawinan *Sirri* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa di catatkan. Fenomena keabsahan kawin *Sirri* secara hukum di Indonesia serta serata tinjauan Hukum Islam, ada upaya mereduksi maraknya kawin *Sirri* yang ada dalam masyarakat kita, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu UU

Perkawinan (UU No. 1 tahun 74) atau biasa disebut dengan KHI.

Perkawinan *Sirri* ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dengan marak dipraktikkan. Namun sampai saat ini masyarakat masih banyak keragaman pemahaman terminologi dan konsep kawin *Sirri*. hal ini dapat dipahami bahwa kawin *Sirri* atau kawin dibawah tangan belum masuk dalam kata baku di Indonesia dan sosialisasinya belum menyeluruh. Demikian juga dengan konsepnya, sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan dan kesamaan rumusan. Salah satunya yang terjadi di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Jika dilihat dari penduduknya berjumlah 111.444 jiwa dan jumlah pasangan kawin *Sirri* atau kawin dibawah tangan lebih dari 100 pasangan, dapat dikatakan yang melakukan praktik kawin *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sangatlah banyak.

Sebahagian besar menurut persepsi mereka (pasangan kawin *Sirri*), yaitu kawin di bawah tangan yang mempunyai pengertian bahwa secara legal formal menurut Hukum Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini di dasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian kawin *Sirri* semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi.

Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang mekawinkan), dua orang saksi, akad ijab Kabul atau transaksi perkawinan, dan mahar. Hal – hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan kawin *Sirri* sebagai keharusan bagi

sah tidaknya suatu perkawinan secara Islam. Sedangkan berkaitan dengan KUA dan adanya publikasi yang biasa dilaksanakan dalam bentuk walimah/resepsi, secara substansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan kemaslahatan serta menghindari kemaksiatan.<sup>60</sup>

Itulah yang mereka pegang saat ini yang mereka jadikan alasan untuk mengawinkan anak mereka dengan pasangannya dengan cara kawin *Sirri*. Dan mereka mengesampingkan keabsahan oleh KUA dan Negara atau bias dikatakan *timementingkan* buku kawin.

Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan kwin bawah tangan didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku kawin *Sirri*. Alasan mereka kemukakan setiap kali akan mekawinkan.<sup>61</sup> Sedangkan ada juga tokoh masyarakat yang menganggap kawin *Sirri* tidak sah menurut Hukum Islam maupun positif, atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad perkawinan itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, di hadapan dan dicatatkan oleh PPN.<sup>62</sup>

Mengenai pandangan tentang keabsahan kawin *Sirri* ini, terdapat pendapat yang disampaikan oleh Bapak Karmidin. selaku petugas KUA Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, dimana berbeda dengan kedua pendapat diatas, dengan melihat latar belakang

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan pasangan yang melakukan kawin *Sirri* di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, 13 Agustus 2019.

<sup>61</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat yang memperbolehkan kawin *Sirri* di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat 14 Agustus 2019.

<sup>62</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat pada 14 Agustus 2019.

pasangan kawin *Sirri*, dia menyarankan untuk mengawinkan dibawah tangan. Pendapatnya ini dari satu sisi bertentangan dengan tugasnya sebagai petugas PPN, namun alasan kemaslahatan dan guna menghindari terjadinya perzinaan dan kumpul kebo, dia memperbolehkan kawin dibawah tangan atau kawin *Sirri*, walaupun saat perkawinan dia tidak menghadirinya.<sup>63</sup>

Adapun pelaksanaan prosesi perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ini dihadiri oleh :

- a. Kedua calon mempelai
- b. Dua orang saksi
- c. Wali dan keluarga kedua belah pihak
- d. disertai ulama setempat yang memimpin prosesi akad kawin.

Menurut KH. Ruhandi yang sering mekawinkan pasangan sebagai suami istri di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat secara bawah tangan atau *Sirri*, baik tetangga sendiri, keluarga maupun orang luar daerah yakni sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya kumpul kebo (zina).
- b. Demi kemaslahatan umat.
- c. Karna syarat dan rukun telah terpenuhi untuk mekawin.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan petugas PPN pada 15 Agustus 2019.

<sup>64</sup> Wawancara dengan KH. Ruhandi selaku yang memimpin akad kawin *Sirri* pada 15 Agustus 2019

### **C. Dampak Praktik Perkawinan *Sirri* Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah**

#### **Kab. Pesisir Barat**

Dampaknya yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, antara lain:

1. perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.
3. akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya,

dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampaknya atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.<sup>65</sup>

Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan perkawinan dengan menyelenggarakan walimatul ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari penyiaran perkawinan di antaranya adalah:

1. untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat
2. memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan salahsatu penghulu di KUA Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat pada tanggal 15 Agustus 2019.



3. memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah mekawin atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan perkawinan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (*Sirri*). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah misalnya, jika perempuan yang dikawini *Sirri* hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, perkawinan *Sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai perkawinannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi perkawinan *Sirrinya* dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan perkawinan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.<sup>66</sup>

Kawin *Sirri* apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu perkawinan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta perkawinan. Tidak adanya akta perkawinan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang perkawinannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalahmasalah yang dialami bagi pelaku kawin *Sirri*. Misalnya, istri

---

<sup>66</sup> Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firefox 2009), h. 3-5. <http://akmapala09.blogspot.com.wahyu.html> (16 Agustus 2019)

ditinggal suami mekawin lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.

Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam kawin *Sirri* tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun perkawinan tanpa pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun istri untuk saling mengingkari perkawinannya. Kawin *Sirri* selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>67</sup>

Dampaknya negatif lainnya dari kawin *Sirri* selain mudah ditinggalkan, yaitu mudahnya terjadi poligami, dan kawin *Sirri* juga seringkali menimbulkan rasa khawatir bagi yang menjalaninya. Karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Effi Setiwati, 150 Masalah Kawin Keluarga, h. 136-138

<sup>68</sup> 150 Masalah Kawin Keluarga, h. 146

**D. Upaya Kepala Pekon Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Dalam Penyelesaian Segketa Perkawinan *Sirri***

Untuk meminimalisir terjadinya Perkawinan *Sirri*, Kepala Pekon melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut:

1. Tahap awal dengan dinasehati oleh ustad atau orang yang dipercayai ketika hendak melakukan Perkawinan *Sirri*.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang yang hendak melakukan Perkawinan *Sirri*, menjelaskan resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya nanti serta akan ada dampak negatif bagi anak yang lahir akibat Perkawinan *Sirri* tersebut
3. Ditanggguhkan Surat Kawin jika memang sudah terlanjur melakukan Perkawinan *Sirri*.
4. Memperketat aturan perkawinan *Sirri*.
5. Peningkatan pemahaman agama.

Langkah konkrit di atas ada salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Pekon untuk melindungi hak-hak setiap warganya khususnya dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*. Namun belum ada satu keterpaduan antara satu program dengan program lainnya atau antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Hal ini mejadi problem yang belum terpecahkan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*.

Untuk menceah terjadinya Perkawinan *Sirri*, Kepala Pekon berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait Perkawinan *Sirri* sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan Perkawinan *Sirri*

berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, Kepala Pekon semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait Perkawinan *Sirri* beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat Perkawinan *Sirri* kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa Perkawinan *Sirri* adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan Perkawinan *Sirri* dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan Perkawinan *Sirri* yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara Kepala Pekon dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya Perkawinan *Sirri* sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat Perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Perkawinan dibawah tangan/kawin *siri* merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam melangsungkan perkawinan umat Islam pada umumnya dan perkawinan di pekon pahamang khususnya. Disisi lain hal ini dapat menimbulkan permasalahan krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan/ Kawin siri. Sehingga keluarga tersebut diliputi masalah yang menyebabkan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga menjadi terganggu.

Bagaimana jika Perkawinan dibawah tangan/kawin siri terlanjur terjadi ?

1. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat Kawin

Untuk memberikan legitimasi Kawin *siri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan kadang ditempuh dengan permohonan itsbat Kawin ke Pengadilan Agama. Itsbat Kawin yang sering disebut dengan pengesahan Kawin adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair.

Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari pemohon saja. Oleh karena itu, perkaravoluntair tidak disebut sebagai perkara karena tidak ada pihak lawan atau tidak obyek hukum yang disengketakan. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kompetensi absolute Pengadilan Agama di antaranya adalah Itsbat Kawin, yaitu pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Landasan yuridis dari itsbat Kawin terdapat di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dari ketentuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama tentang itsbat Kawin adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. Bagi yang telah melakukan Perkawinan di bawah tangan/ kawin siri namun

tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta Kawin, dapat mengajukan permohonan dengan itsbat Kawin (PENETAPAN/ PENGESAHAN ) kepada pengadilan agama (kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 7 ). Namun itsbat Kawin ini hanya di mungkinkan bila hanya berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian

- a. Hilangnya akta Kawin
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- c. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Artinya bila ada salah satu dari alasan keempat diatas yang dapat di pergunakan, mmaka dapat segera mengajukan permohonan itsbat Kawin ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan diatas.

2. Melakukan perkawinan ulang

Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA) pencatatan ini penting agar ada status dalam perkawinan yang dilakukan.



Namun status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan/kawin siri akan dianggap anak diluar Kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.

Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar Kawin. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Faktor-faktor penyebab Perkawinan *Sirri* Pada Masyarakat Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Hal yang melatarbelakangi terjadinya Kawin siri di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat di antaranya yaitu:

1. Faktor internal (faktor yang timbul dari pribadi para pihak)

- a) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang berhubungan dengan uang atau biaya. Yang dalam penelitian ini faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya Kawin siri. Faktor finansial tersebut meliputi hal-hal, seperti finansial lemah. Hal ini merupakan suatu keadaan dimana biaya untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Sedangkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat itu sendiri masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menduduki presentasi tertinggi. Jadi tidak diherankan jika finansial lemah ini menjadi faktor yang mempengaruhi Kawin siri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat masih sangat tinggi bahkan menduduki urutan tertinggi. Di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat hal tersebut dialami oleh dua orang, yaitu sebagai berikut:

### 1) Membutuhkan biaya hidup

Faktor ekonomi ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Kawin siri di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan terhadap ibu Muana. Beliau menegaskan melakukan Kawin siri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang kekurangan. Karena ibu Muana sendiri hanya menjadi buruh tani yang tidak menentu ada panggilan untuk menggarap ladang. Dahulu mantan suami ibu Muana merupakan seorang guru namun hanya guru honorer yang dikaruniai dua orang anak. Ibu Muana menjanda karena suaminya meninggal dunia. Setelah itu ibu Muana tinggal sendiri, karena kedua anaknya sudah mempunyai rumah sendiri. Beliau merasa seorang wanita yang hidup sendirian yang masih membutuhkan orang sebagai pendamping hidup. Beliau memutuskan meKawin lagi dan akhirnya bertemu dengan suaminya yang sekarang ini.<sup>69</sup>

### 2) Tidak ada biaya untuk mengadakan pesta

Selain itu ada ibu Rusmiati yang melakukan Kawin siri dikarenakan suaminya tidak sanggup mengadakan pesta Perkawinan karena untuk mengadakan pesta membutuhkan biaya yang banyak. Walaupun hal tersebut bukan suatu hal yang

---

<sup>69</sup> Muana, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

wajib namun hal tersebut merupakan suatu adat istiadat di Pekon Pahmungan . Selain itu ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan Perkawinan) alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih meKawin dengan cara diam-diam, yang penting halal atau ada dua orang saksi tanpa harus melaksanakan pesta seperti umumnya Perkawinan. Selain itu Kawin siri juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya.<sup>70</sup> Untuk menanggulangi hal tersebut seperti mengadakan pesta dengan biaya yang banyak tidak terus dilakukan di desa tersebut.

## 2. Faktor psikologis

### a) Menghilangkan rasa malu

#### 1) Usia tua

Pelaku Perkawinan siri yang bernama ibu Sukinem memandang Perkawinan siri tersebut dilakukan relativ sederhana. Mereka beralasan karena keduanya antara Sukinem dan suaminya sudah memiliki umur yang tidak muda lagi jadi menurut mereka sudah tidak pantas untuk dipublikasikan dalam bentuk walimahan. Lagi pula keduanya sudah menyandang status janda dan duda sehingga keduanya

---

<sup>70</sup> Rusmiati, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

sangat setuju dengan perkawinan siri tersebut.<sup>71</sup>

## 2) Menutupi aib

Dengan alasan ingin menutupi aib, Kawin siri juga dianggap sebagai penyelamat bagi pasangan yang telah terjadi kecelakaan sehingga menimbulkan kehamilan bagi pasangan wanitanya. Karena itulah Kawin siri dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik sebelum keadaan aib ini di dengar oleh masyarakat sekitar. Hal ini terjadi pada ibu Sri dan ibu Nyamirah.<sup>72</sup>

Faktor hamil diluar Kawin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Kawin siri dikalangan masyarakat Pekon Pahmungan . Pergaulan bebas yang membuat mereka mencoba- coba dan akhirnya melakukan hubungan pra Kawin.<sup>73</sup>

## b) Tidak dikaruniai keturunan

Faktor yang keenam akibat tidak dikarunia keturunan oleh istri pertama.Lalu melakukan poligami.Dalam hal ini terjadi pada ibu Sumiati yang diKawini siri oleh Bapak Kamto, karena istri pertamanya tidak bisa memberi keturunan.Lalu bapak Kamto meKawini ibu Sumiati secara siri.Sebab istri pertamanya tidak ingin diceraikan dan mengizinkan untuk meKawin lagi.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> Sukinem, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

<sup>72</sup> Sri, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

<sup>73</sup> Nyamirah, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

<sup>74</sup> Sumiati, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

### 3. Faktor religius

#### a) Berpegang teguh pada hukum agama

Ada anggapan bahwa Kawin siri merupakan sah menurut agama, pencatatan hanyalah tertib administrasi. Hal ini merupakan anggapan dari ibu Nyamirah karena beliau beranggapan bahwa orang yang beragama Islam cukup melakukan Perkawinan dengan memenuhi semua rukun tanpa mencatatkannya. Karena beliau merasa Perkawinan siri juga merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan bayinya agar mempunyai ayah yang dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>75</sup>

#### b) Menghindari perzinaan

Faktor selanjutnya yaitu untuk menghindari zina yang dialami oleh Dzulaikha. Dia melakukan Kawin siri dikarenakan pada saat dia masih di pesantren ia menyukai seorang laki-laki dan laki-laki itu pun juga sebaliknya. Singkat cerita oleh pak kyai yang ada di pesantren tersebut menyuruhnya untuk melakukan Perkawinan secara siri agar tidak terjadi zina.<sup>76</sup>

### 3. Faktor eksternal (faktor yang timbul dari pihak lain)

#### a) Adanya tokoh yang bersedia meKawinkannya

Tokoh yang dimaksud adalah seorang yang dianggap mengetahui dan memahami tentang hukum Islam yang disegani dan bersedia untuk meKawinkan secara siri pada pasangan yang

---

<sup>75</sup> Nyamirah, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

<sup>76</sup> Zulaikha, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.

mengiginkannya. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran tokoh masyarakat ini sangat mendukung terlaksananya proses Kawin siri, karena masyarakat menganggap bahwa pada tokoh inilah permasalahan yang mereka hadapi dapat diadukan dan bahkan mencari jalan keluarnya.

Penelitian menemui seorang tokoh masyarakat di Pekon Pahmungan , yang mana beliau bersedia meKawinkan pasangan yang ingin melakukan Kawin siri. Beliau memaparkan faktor yang melatarbelakangi kesediaan beliau melakukan Perkawinan siri, bahwa Kawin siri tersebut adalah alternatif yang masih saja ditemukan di masyarakat sampai saat ini.<sup>77</sup>

b) Hukum yang kurang tegas

Praktik Kawin siri juga terjadi karena adanya hukum yang kurang merespon terhadap pelanggaran ini. Peraturan mengenai sanksi bagi para pelaku Kawin siri memang sudah ada. Namun di Pekon Pahmungan tersebut sanksinya tidak diterapkan. Oleh sebab itulah Kawin siri masih terus berkembang di masyarakat. Karena warganya merasa tidak sesuatu hukuman yang akan membebani mereka.

c) Masyarakat sekitar kurang tanggap

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan Kawin siri di Pekon Pahmungan terus berkembang

---

<sup>77</sup> Munir, hasil Wawancara, 07 Agustus 2019.



dari tahun ketahun. Keadaan masyarakat yang kurang peduli dengan masyarakat sekitarnya membuat para pelaku menjadi lebih leluasa untuk melakukan Kawin siri. Pola hidup layaknya di daerah perkotaan yang bisa dikatakan sebagai pola hidup masyarakat Pekon Pahmungan .Di Desa tersebut jika ada tetangga yang melakukan kesalahan hanya diabaikan saja tidak ada yang mau menasihati bahkan kemungkinan buruk seperti menjadikan bahan pembicaraan juga tidak terjadi. Masyarakat Pekon Pahmungan lebih cenderung hidup secara individual. Walaupun masyarakat sekitar tau apa yang terjadi namun enggan untuk menasihatinnya.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah ketaatan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai compliance, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Pekon Pahmungan . Karena perangkat desa di Desa tersebut tidak mau menindak lanjuti permasalahan Kawin siri tersebut. Agar

masyarakat mau menaati peraturan di desa tersebut seharusnya perangkat desanya melakukan pendataan terhadap para pelaku Kawin siri dan melakukan tindakan lanjut. Hal tersebut sesuai dengan teori ketaatan hukum yang menyatakan bahwa pembuatan organisasi penegakan hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas di dalamnya tidak dapat menjalankan peran penegak hukum dengan baik. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya, kemungkinan besar hukum akan efektif, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pasangan Perkawinan *Sirri* yang diperoleh melalui wawancara, terungkap bahwa alasan melakukan Kawin bawah tangan yakni sebagai berikut :

a. Mahalnya biaya perkawinan

Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi Perkawinan diawali dengan uang Disamping itu kondisi ekonomi pasangan Perkawinan siri ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

b. Kendala pada masa studi

Adapun alasan pokok dari para pelajar tentang masalah ini adalah tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, dan malu dengan masyarakat dalam masa studi atau teman sekolah dan gurunya.

c. Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku Kawin dibawah tangan yakni berpendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum Islam (dalam hal ini hukum Kawin) kurang, dan sebatas pada apa yang diberikan oleh tokoh agama dan ulama yang ada disekitarnya.

Selain hal tersebut ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi Kawin siri, seperti: hukum yang kurang tegas. Mengenai faktor tersebut hukum di desa tersebut harus ditegaskan atau ditegakan. Dalam menegakan hukum, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu penegak hukum di antaranya yaitu: sarana atau fasilitas, penegak hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini di Pekon Pahlungan fasilitas untuk melakukan Kawin siri sebenarnya sudah ada yaitu kantor urusan agama, sedangkan penegak hukum juga sudah ada yaitu perangkat desan namun belum bisa menjalankan peran mereka dengan baik, dan masyarakat berarti pelaku Kawin siri itu sendiri.

Walaupun ada beberapa faktor yang melatar belakangi warga melakukan Kawin siri namun seharusnya warga desa tersebut tetap menaati hukum yang telah dibuat. Sesuai dengan

pendapat Ali Ahmad yaitu kewajiban utama bagi setiap orang (prime face) adalah kewajiban untuk menaati hukum. Dengan cara membiasakan mencatatkan Perkawinan di KUA walaupun ada beberapa faktor yang mendukung untuk tidak mencatatkan. Hal ini sesuai dengan teori ketaatan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan tentang dasar-dasar kepatuhan terhadap suatu kaidah, termasuk kaidah hukum pada poin b adalah disebabkan karena sejak mengalami proses sosialisasi maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari dijumpai, maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi, terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama. Jadi yang seharusnya dilakukan oleh warga Pekon Pahlungan mulai membiasakan melakukan pencatatan Perkawinan. Agar hukum mengenai Kawin siri di desa tersebut tidak diabaikan lagi.

Selain itu agar warga mau menaati peraturan mengenai Kawin siri hukum mengenai sanksi yang telah ada pada undang-undang haruslah ditegakan. Penegakan hukum mengenai denda seperti Seperti pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: *pertama* melanggar pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Kawin; *kedua*, melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin dan dihadiri dua saksi. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>78</sup>

Namun jika ada masyarakat yang melakukan Kawin siri sanksi tersebut tidak benar-benar diterapkan. Oleh sebab itulah para pelaku Kawin siri merasa tenang-tenang saja dengan status yang mereka sandang. Dan hal itulah yang menyebabkan Kawin siri terus menerus berkembang di masyarakat khususnya di Pekon Pahlungan. Hal tersebut sesuai yang dituangkan oleh bapak Umar. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya penegakan hukum. Agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Yang perlu ditegakan menurut penulis yaitu merupakan peraturan sanksi yang selama ini tidak diterapkan. Karena Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku agar masyarakat mau

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

menaati peraturan.

Oleh karena itu Sajipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Inilah salah satu solusi agar Perkawinan siri di Pekon Pahmungan tidak terus dilakukan. Dan jika tidak dilakukan maka akan terjadi keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara yang ada dalam masyarakat. Seharusnya ada sanksi bagi para pelanggar peraturan baru yang dibuat oleh masyarakat. Karena sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Di dalam masyarakat modern keefektifan sanksi untuk menjamin kepatuhan masyarakat pada hukum, termasuk ketika hukum telah dilanggar bergantung pada kondisi organisasi penegak hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan itu.<sup>79</sup>

Selain itu dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Kawin siri itu menimbulkan beberapa implikasi diantaranya yaitu konsentrasi belajar terganggu, kesehatan terganggu, susah mengurus perceraian ketika ada suatu permasalahan, anak tidak mempunyai akta kelahiran, rasa resah

---

<sup>79</sup> Sutandyo, *Hukum*, 136

dan kebutuhan terpenuhi.

Semua tingkah laku dari pelaku Kawin siri merupakan prinsip rasionalitas karena dalam bab II dijelaskan semua tindakan manusia didasarkan pada prinsip rasionalitas. Menurut Bentham kualitas atas kesenangan dan penderitaan pada prinsipnya sama saja bagi semua orang, sementara yang membedakan adalah kuantitas, kesenangan dan penderitaan itu. Kuantitas inilah yang perlu diukur. Kuantitas yang dimaksud adalah kemanfaatannya jadi berdampak positif atau negatif itu sama saja. Maksudnya sama saja hal tersebut dialami oleh pelaku Kawin siri. Yang membedakan kuantitas maksudnya perasaan yang bahagia dan merasa menderita.

#### **B. Peran Kepala Pekon Dalam Meminimalisir Terjadinya Perkawinan *Sirri***

Untuk meminimalisir terjadinya Perkawinan *Sirri*, kepala desa melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut:

1. Tahap awal dengan dinasehati oleh ustad atau orang yang dipercayai ketika hendak melakukan Perkawinan *Sirri*.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang yang hendak melakukan Perkawinan *Sirri*, menjelaskan resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya nanti serta akan ada dampak negatif bagi anak yang lahir akibat Perkawinan *Sirri* tersebut



3. Ditangguhkan Surat Kawin jika memang sudah terlanjur melakukan Perkawinan *Sirri*.
4. Memperketat aturan perkawinan *Sirri*.
5. Peningkatan pemahaman agama.

Langkah konkrit di atas ada salah satu tindakan yang dilakukan oleh kepala desa untuk melindungi hak-hak setiap warganya khususnya dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*. Namun belum ada satu keterpaduan antara satu program dengan program lainnya atau antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Hal ini menjadi problem yang belum terpecahkan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*.

Untuk menceah terjadinya Perkawinan *Sirri*, kepala desa berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait Perkawinan *Sirri* sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan Perkawinan *Sirri* berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, kepala desa semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait Perkawinan *Sirri* beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat Perkawinan *Sirri* kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa Perkawinan *Sirri* adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

Upaya pencegahan Perkawinan *Sirri* dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam

pencegahan Perkawinan *Sirri* yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara kepala desa dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya Perkawinan *Sirri* sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat Perkawinan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Perkawinan dibawah tangan/kawin *siri* merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam melangsungkan perkawinan umat Islam pada umumnya dan perkawinan di pekon pahumang khususnya. Disisi lain hal ini dapat menimbulkan permasalahan krusial dalam keluarga yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan/ Kawin *siri*. Sehingga keluarga tersebut diliputi masalah yang menyebabkan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga menjadi terganggu.

Bagaimana jika Perkawinan dibawah tangan/ kawin *siri* terlanjur terjadi ?

#### 1. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat Kawin

Untuk memberikan legitimasi Kawin *siri* atau perkawinan yang tidak dicatatkan kadang ditempuh dengan permohonan itsbat Kawin ke Pengadilan Agama. Itsbat Kawin yang sering disebut dengan pengesahan Kawin adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair.

Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari pemohon saja. Oleh karena itu, perkaravoluntair tidak

disebut sebagai perkara karena tidak ada pihak lawan atau tidak obyek hukum yang disengketakan. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kompetensi absolute Pengadilan Agama di antaranya adalah Itsbat Kawin, yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Landasan yuridis dari itsbat Kawin terdapat di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dari ketentuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama tentang itsbat Kawin adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. Bagi yang telah melakukan Perkawinan di bawah tangan/ kawin siri namun tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta Kawin, dapat mengajukan permohonan dengan itsbat Kawin (PENETAPAN/ PENGESAHAN) kepada pengadilan agama (kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 7 ). Namun itsbat Kawin ini hanya di mungkinkan bila hanya berkenaan dengan:

2. Dalam rangka penyelesaian perceraian
  - a. Hilangnya akta Kawin

- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- c. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Artinya bila ada salah satu dari alasan keempat diatas yang dapat di pergunakan, maka dapat segera mengajukan permohonan itsbat Kawin ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan diatas.

### 3. Melakukan perkawinan ulang

Perkawinan ulang dilakukan dengan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA) pencatatan ini penting agar ada status dalam perkawinan yang dilakukan.

Namun status anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan dibawah tangan/kawin siri akan dianggap anak diluar Kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.

Oleh karenanya dalam akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar

Kawin. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

### **C. Pandangan hukum Islam terhadap praktik Perkawinan *Sirri* di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat**

Hukum Kawin *Sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun Kawinnya terpenuhi pada saat Kawin *Sirri* digelar. Rukun Kawin yaitu:

1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali
3. Adanya saksi Kawin
4. Adanya mahar atau maskawin
5. Adanya ijab kabul atau akad.<sup>80</sup>

Menurut hukum Islam Kawin *Sirri* sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).<sup>81</sup> Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun Kawin atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan

---

<sup>80</sup> Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firefox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (20 Agustus 2019).

<sup>81</sup> Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firefox 2009), h. I. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (20 Agustus 2019)

masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Kawin sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kawin yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Kawin")<sup>82</sup>.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun

---

<sup>82</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87

Perkawinan itu adalah Perkawinan *Sirri*. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan Perkawinan pria dewasa dengan wanita secara *Sirri* merupakan Perkawinan terlarang karena Perkawinan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.<sup>22</sup> Kawin *Sirri* sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Perkawinan *Sirri* sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu:

1. Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. An-Nisa/4:21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

2. Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar



atau semitra. Konsep Kawin *Sirri* bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam “maqasid al-syariah”, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).<sup>83</sup> Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil Kawin *Sirri*.

Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat Islam. Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُوفِ.

Artinya:

“Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani”; Ahmad bin Mani” diceritakan Yazid bin Harun, dating kepada kami Isa bin Maimuna alAnsari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan perkawinan ini dan jadikanlah akad Kawin itu di masjid, serta pukullah rebana”” (HR. at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).<sup>84</sup>

Untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan Perkawinan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan.

<sup>83</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 27

<sup>84</sup> Imam Malik, *Maja"fi Ila"an an-Kawin*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 (CD ROM), hadis. No. 1009

Saksi dalam Perkawinan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan Perkawinan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya Kawin, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad Kawin. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan Kawin *Sirri* (rahasia).

Selanjutnya, diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir dua orang untuk menyaksikan Perkawinan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan Perkawinan itu, apakah ini termasuk Kawin *Sirri* atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk Perkawinan *Sirri*, yakni terlarang, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya Perkawinan, atau dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.<sup>85</sup> Melihat kehadiran saksi dan penyebaran berita Perkawinan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran Perkawinan. Dengan dikemukakannya Perkawinan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bernesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika

---

<sup>85</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Kawin Mut'ah Sampai Kawin Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 214-215.

terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu", dan sebagainya.

Menurut ajaran Islam, Kawin itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar Kawin itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari publikasi Kawin itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain. Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus Kawin *Sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya Kawin *Sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila Kawin *Sirri* itu cepat-cepat dipublikasikan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> M Tahir Maloko, *perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Sirri* pdf. h. 232 <http://akmapala09.blogspot.com.html> (21 Agustus 2019)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penyusun kemukakan di atas yang terdiri 4 bab tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawin sirri* dan Dampak pada Masyarakat di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Faktor Penyebab Perkawinan *Sirri*

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan Perkawinannya di lembaga pencatatan sipil negara, yaitu :

- a. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.
- b. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri Kawin lebih dari satu dan lain sebagainya.
- c. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu Perkawinan siri.
- d. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan Perkawinannya.

2. Peran Kepala Pekon meminimalisir terjadinya Perkawinan *Sirri*,

Kepala Pekon melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut:

- e. Tahap awal dengan dinasehati oleh ustad atau orang yang dipercayai ketika hendak melakukan Perkawinan *Sirri* .
- f. Melakukan sosialisasi kepada orang yang hendak melakukan Perkawinan *Sirri*, menjelaskan resiko-resiko yang akan dihadapi kedepannya nanti serta akan ada dampak negatif bagi anak yang lahir akibat Perkawinan *Sirri* tersebut
- g. Ditangguhkan Surat Kawin jika memang sudah terlanjur melakukan Perkawinan *Sirri*.
- h. Memperketat aturan perkawinan *Sirri*.
- i. Peningkatan pemahaman agama.

Langkah konkrit di atas ada salah satu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Pekon untuk melindungi hak-hak setiap warganya khususnya dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*. Namun belum ada satu keterpaduan antara satu program dengan program lainnya atau antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Hal ini mejadi problem yang belum terpecahkan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan Perkawinan *Sirri*.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang perkawinan sirri Hukum Kawin *Sirri*

secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun Kawinnya terpenuhi pada saat Kawin *Sirri* digelar. Akan tetapi kawin sirri melanggar hukum

administrasi Negara. Akibatnya perkawinan sirri tidak bagus untuk hukum yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Upaya Kepala Pekon meminimalisir perkawinan sirri yaitu dengan cara memberikan penyadaran baru terhadap masyarakat di Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai aturan agama dan Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi percekcoan serta masalah yang besar karena tidak diakui statusnya dalam Negara.
2. Tinjauan hukum Islam bahwa perkawinan sirri itu boleh dilakukan menurut syariat islam akan tetapi tidak bisa di catat dalam administrasi Negara, dengan hal ini diharapkan agar masyarakat memahami bahwa pernikahan itu sebaiknya sah dimata islam dan Negara, hal ini terjadi agar masyarakat sadar karena dampak pernikahan sirri ini sangat besar terutama bagi istri dan anak, anak tidak akan di akui oleh Negara karena tidak memiliki akte kelahiran bahkan dari segi harta goni gini pun tidak akan di akui.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986)
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Pt .Rineka Cipta, Jakarta, 1996)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986)
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat* 2007
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006)
- Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu,1997)
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:Karya Toha Putra h Semarang, 2011)
- Devita Irma, *Akibat Hukum Dari Kawin Sirri h. I*. <http://irmadevita.com> (15 Februari Muh. ramli. makalah tentang Perkawinan Sirri<http://kudenden.blogspot.com/2013/02/i.html>, di akses tanggal 15 Agustus 2019
- Djalil Abdul, *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Cet.I; Yogyakarta: LKIS, 2000)
- Dokumentasi Profil Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981)
- Happy Susanto, 2007, *Kawin sirri apa untungnya*, (Transmedia Pustaka,Jakarta selatan)
- Hasan M Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)



*Hukum Online. Com/Klinik.* Di akses tanggal 13 Juli 2019

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Malik Imam, *Maja"fi Ila"an an-Kawin*, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 (CD ROM), hadis. No. 1009

Maloko M Tahir, *perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Sirri* pdf. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (21 Agustus 2019)

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam*( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Menteri Agama, *Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Al-Quran dan Terjemahnya*, (Makkah: lembaga Percetakan Raja Al-Fahd, 1971)

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Nurhaedi Dedi, *Kawin di Bawah Tangan Praktik Kawin Siri Mahasiswa Jogja* (Jogja: Ar-Ruzz Media, 2003)

Pratama Wahyu, *Makalah Spai* (Mozilla Firefox 2009) <http://akmapala09.blogspot.com.wahyu.html> (16 Agustus 2019)

Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*,( Jakarta: Bumi Aksar, 1996)

Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Sahrani Tihami Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Kawin Lengka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Samin Sabri, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kholam Publishing, 2008)

Setiawan Effi, *Kawin Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, (Cet.I; Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005)

Shihab M. Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Kawin Mut"ah Sampai Kawin Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet. II; Jakarta:

Lentera Hati, 2005)

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997)

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT rineka cipta, Jakarta 2005)

Suriasumantri Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987)

Susanto,Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Syahr Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya* (Bandung: Offset Alumni, 1981)

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006)

